

**PENGARUH KETIDAKSTABILAN  
NILAI TUKAR RUPIAH  
DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN  
KEPUTUSAN EKONOMI**

**Timbul Sinaga**

*Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi-Universitas HKBP Nommensen,*

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh ketidakstabilan nilai tukar rupiah dan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dan keputusan ekonomi. Ketidakstabilan nilai tukar Rupiah akan berdampak terhadap pemilihan kebijakan akuntansi. Kualitas laporan keuangan selain dipengaruhi oleh keadaan ekonomi juga dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi. Keputusan ekonomi oleh manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan sangat tergantung kepada kualitas informasi yang digunakan. Kebijakan akuntansi yang dipilih sedapat mungkin adalah kebijakan akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang secara kualitas dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemilihan kebijakan akuntansi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena besar kemungkinan bahwa prinsip-prinsip yang sedianya dianut tidak dapat dipenuhi sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas keputusan ekonomi yang diambil.

**Kata kunci:** *Ketidakstabilan nilai tukar rupiah, kebijakan akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan keputusan ekonomi.*

## **PENDAHULUAN**

Setiap organisasi pada dasarnya didirikan dalam batas waktu yang tidak terbatas. Perusahaan adalah salah satu organisasi yang direncanakan untuk beroperasi dalam waktu yang tidak terbatas tersebut. Prinsip beroperasi yang tidak terbatas ini oleh akuntansi dikenal dengan *going concern principles*. Di dalam perjalanannya perusahaan atau *entity* selalu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat. Faktor-faktor yang dimaksud tersebut sedapat mungkin dituangkan dalam bentuk informasi baik formal maupun secara informal. Informasi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok informasi yaitu; informasi kuantitatif (*quantitative information*), dan informasi kualitatif (*qualitative information*). Salah satu bentuk informasi kuantitatif adalah tertuang di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi.

Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mulai mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sebagai dampaknya atau juga dianggap sebagai pemicunya adalah bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat menjadi tidak stabil, puncaknya terjadi mulai Agustus 1997 sampai dengan akhir 2001. Ketidakstabilan nilai tukar ini mempunyai dampak yang luas dan kompleks terhadap keberadaan perusahaan, khususnya perusahaan yang dalam operasinya atau transaksinya banyak berhubungan atau bersentuhan dengan mata uang asing. Semakin banyak transaksi suatu perusahaan berhubungan dengan mata uang asing maka semakin besarlah dampak ketidakstabilan Rupiah tersebut terhadap keberadaan perusahaan bersangkutan.

Ketidakstabilan nilai tukar Rupiah akan berdampak terhadap pemilihan kebijakan akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan pengambilan keputusan ekonomi. Kebijakan akuntansi yang dipilih sedapat mungkin merupakan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kondisi ketidakstabilan rupiah tersebut sehingga diharapkan masih dapat menghasilkan informasi keuangan yang secara kualitas dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemilihan kebijakan akuntansi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena besar kemungkinan bahwa prinsip-prinsip yang sedianya dianut tidak dapat dipenuhi sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas keputusan ekonomi yang diambil. Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk mengkaji bagaimana *"Pengaruh Ketidakstabilan Kurs Rupiah dan Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Keputusan Ekonomi"*.

### **Ketidakstabilan Nilai Tukar Rupiah**

Ketidakstabilan nilai tukar Rupiah merupakan suatu kondisi ekonomi makro dimana nilai tukar tersebut berfluktuasi dari waktu ke waktu yang adakalanya sulit untuk diprediksi tingkat keakuratannya. Berikut ini adalah gambaran ketidakstabilan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat per akhir bulan dari tahun 1997 sampai dengan 2001. Dari data tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat per akhir bulan pada tahun 1997 mengalami kecenderungan naik setiap bulannya, tahun 1998 mengalami naik-turun secara berarti, begitu juga untuk tahun 1999, 2000, dan 2001.

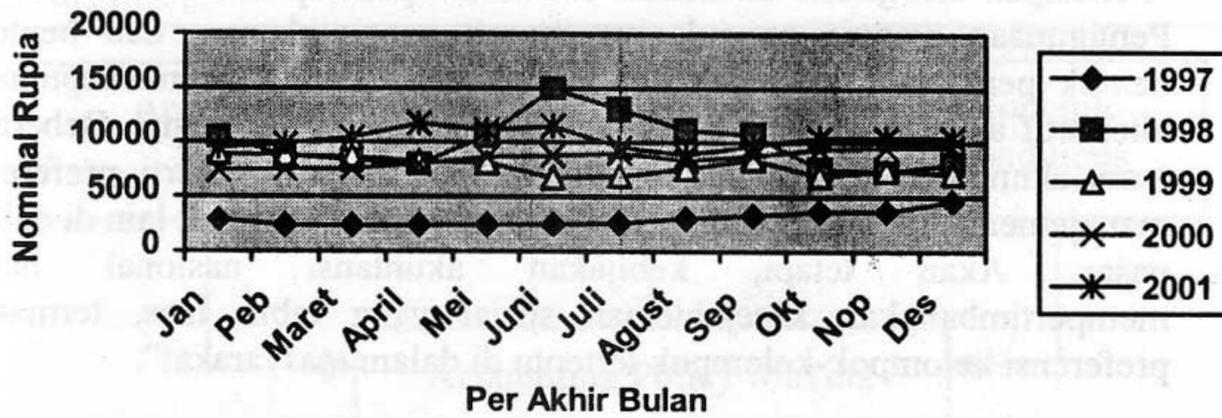
**Tabel 1**  
**Nilai Tukar Dollar Amerika Serikat Terhadap Rupiah**  
**Berdasarkan Kurs Tengah di Bank Indonesia**  
**Per Akhir Bulan Tahun 1997-2001**

Per-Akhir Bulan	1997	1998	1999	2000	2001
Januari	2.936	10.375	8.950	7.425	9.450
Pebruari	2.406	8.750	8.730	7.505	9.835
Maret	2.419	8.325	8.685	7.590	10.400
April	2.433	7.970	8.260	7.945	11.675
Mei	2.440	10.525	8.105	8.620	11.058
Juni	2.450	14.900	6.726	8.735	11.440
Juli	2.599	13.000	6.875	9.003	9.525
Agustus	3.035	11.075	7.565	8.290	8.865
September	3.275	10.700	8.386	8.780	9.675
Oktober	3.670	7.550	6.900	9.395	10.435
Nopember	3.648	7.300	7.425	9.530	10.430
Desember	4.650	8.025	7.100	9.595	10.400

Sumber: Bank Indonesia, 2001: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (*Indonesian Financial Statistics*).

Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa per akhir bulan April tahun 1998 nilai 1 Dollar AS adalah Rp 7.970 kemudian per akhir bulan Juni adalah Rp 14.900 dan per akhir bulan Nopember kembali menjadi Rp 7.300 yaitu terjadi perbedaan sebesar Rp 7.600. Begitu juga pada tahun 1999, nilai Rupiah per 1 Dolar AS tertinggi adalah pada per akhir bulan Juni yaitu Rp 6.726 dan nilai yang paling rendah adalah per akhir bulan Januari yaitu Rp 8.950 yaitu terjadi perbedaan sebesar Rp 2.224. Hal yang berfluktuasi masih terjadi pada tahun 2000, dimana per akhir bulan Januari adalah sebesar Rp 7.425 dan per akhir Desember adalah Rp 9.595 atau terjadi perbedaan Rp 2.170. Pada tahun 2001 juga masih terjadi fluktuasi yang tidak menentu dimana per akhir bulan April sebesar Rp 11.675 kemudian per akhir Agustus sebesar Rp 8.865 dan turun lagi menjadi Rp 10.435 per akhir Oktober. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini:

Grafik Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar



Keadaan ini tentunya secara makro akan mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan dan dalam skala mikro sangat mempengaruhi industri-industri yang transaksinya banyak dipengaruhi oleh valuta asing. Kondisi nilai tukar Rupiah yang demikian akan berdampak terhadap bagaimana transaksi-transaksi ekonomi yang menggunakan mata uang asing dalam hal ini Dolar Amerika Serikat dituangkan dalam laporan atau informasi keuangan. Hal ini sangat penting untuk menghindari supaya laporan keuangan yang disajikan tidak salah saji secara material atau dengan kata lain laporan keuangan yang disajikan masih tetap menggambarkan realitas ekonomi yang sebenarnya.

### Kebijakan Akuntansi

Kebijakan atau teknik akuntansi merupakan alternatif pilihan dari prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan, dan prosedur yang digunakan oleh manajemen di dalam rangka menyajikan laporan keuangan atas transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukannya selama satu periode tertentu. **Ikatan Akuntan Indonesia (1994: PSAK No 1; 07)** menerangkan bahwa:

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

Pilihan kebijakan akuntansi yang diambil tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara professional yaitu harus menggambarkan realitas ekonomi *entity* bersangkutan sehingga informasi yang disajikannya

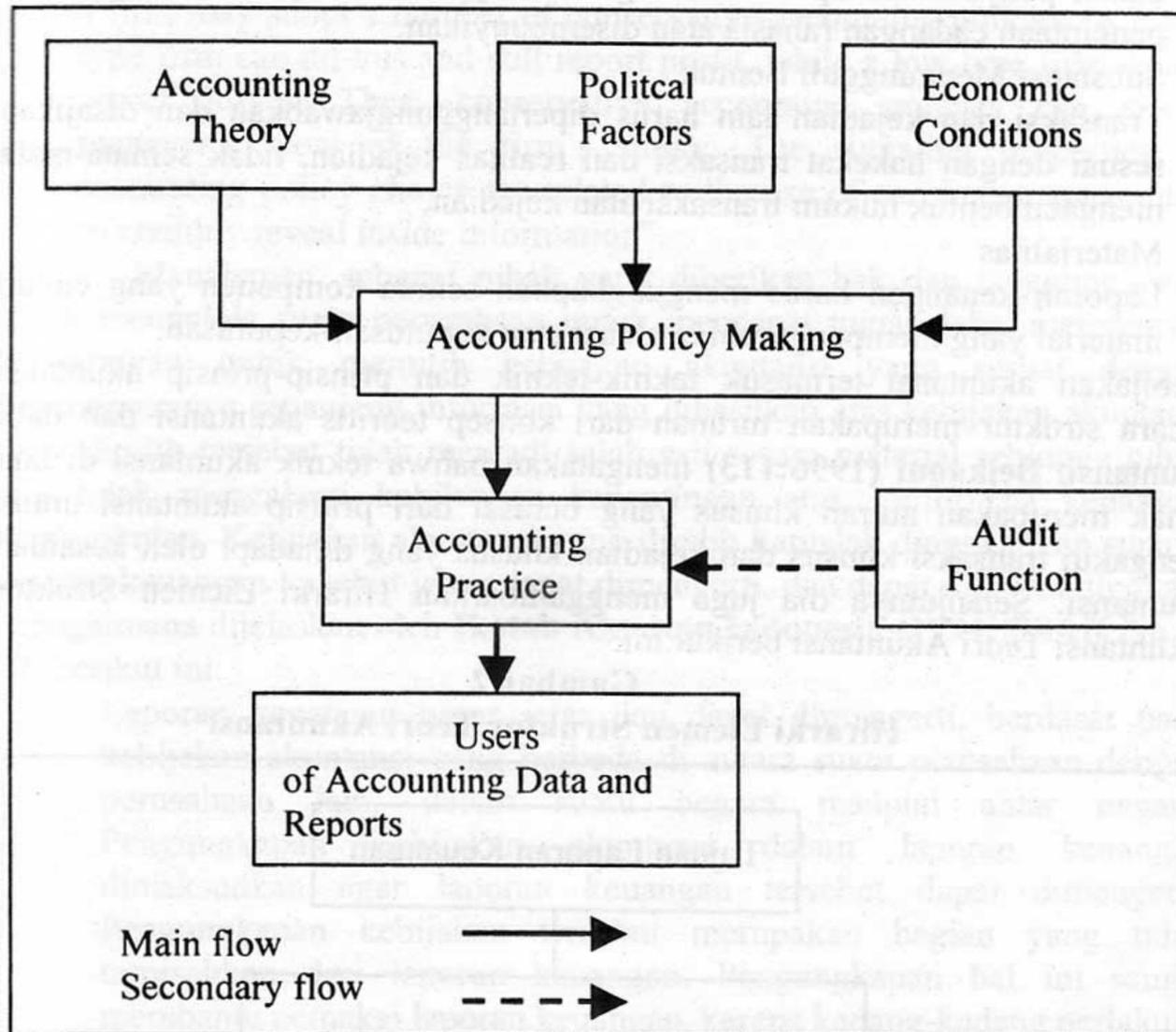
dapat berguna secara optimal di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lebih jauh **Hendriksen (1994:111)** mengatakan bahwa:

“Penetapan kebijakan akuntansi menuntut penetapan sasaran (*goals*). Penggunaan metode pengukuran, aturan pengungkapan, dan bentuk-bentuk penyajian saja tidak cukup sebagai sasaran, karena keputusan alternatif akan menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial. Beberapa teori akuntansi dapat befokus pada tujuan khusus, seperti preferensi manajemen, akuntan, perorangan, atau pasar atau kelompok lain di dalam pasar. Akan tetapi, kebijakan akuntansi nasional harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial yang lebih luas, termasuk preferensi kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat”.

Selanjutnya **Wolk, Francis, and Tearney (1992:7)** mengatakan bahwa ada tiga komponen utama dalam mempengaruhi kebijakan akuntansi yaitu teori akuntansi, faktor politik, dan kondisi ekonomi, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Lebih jauh dikatakan bahwa dari ketiga komponen utama tersebut, kondisi ekonomi mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar dari pada teori akuntansi dan faktor politik.

Dengan demikian kondisi ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat penting baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan akuntansi. Artinya bahwa ketidakstabilan nilai tukar Rupiah yang berkepanjangan terhadap valuta asing akan mendorong manajemen perusahaan untuk menggunakan kebijakan atau teknik akuntansi yang mungkin melanggar prinsip-prinsip atau aturan-aturan umum untuk tujuan menghasilkan data dan laporan keuangan *entity* yang lebih realistis atau yang lebih dikenal dengan istilah “*substance over form*”.

**Gambar 1**  
**The Financial Accounting Environment**



**Sumber:** Harry I.Wolk., Jere R. Francis., Michael G. Tearney, 1992., *Accounting Theory; A Conceptual and Institutional Approach*, Third Edition, Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Co.

Di dalam pemilihan kebijakan akuntansi haruslah dilakukan secara hati-hati, artinya dengan adanya ketersediaan pilihan kebijakan akuntansi yang bervariasi haruslah dapat membantu manajemen untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang terhindar dari salah saji secara material atau sebaliknya bukan digunakan untuk tujuan mempercantik (*window dressing*) laporan keuangan.

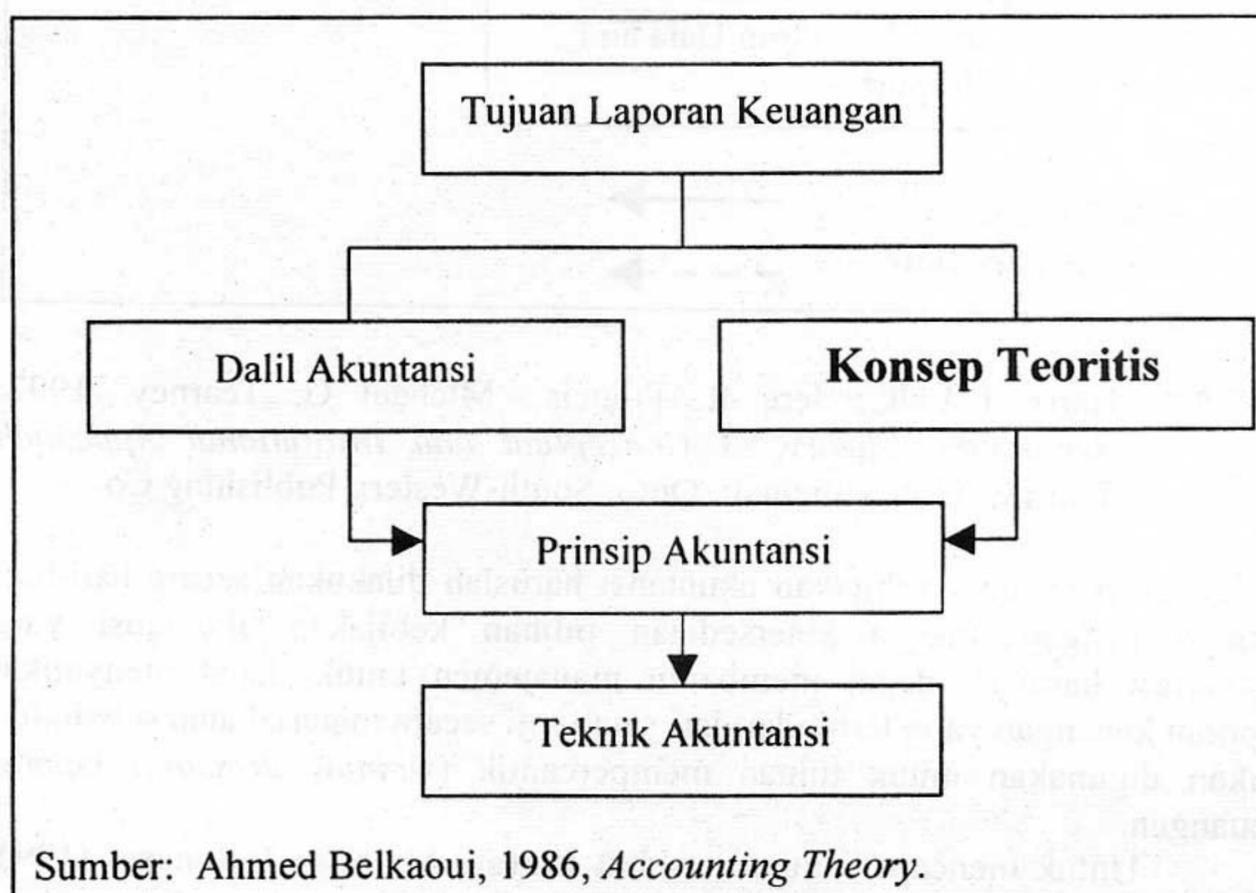
Untuk mencapai tujuan tersebut **Ikatan Akuntan Indonesia (1994: PSAK No 1; 08)** menerangkan bahwa:

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

- a. **Pertimbangan Sehat**  
Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut harusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
- b. **Substansi Mengungguli Bentuk**  
Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realitas kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
- c. **Materialitas**  
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Kebijakan akuntansi termasuk teknik-teknik dan prinsip-prinsip akuntansi secara struktur merupakan turunan dari konsep teoritis akuntansi dan dalil akuntansi. **Belkaoui (1996:113)** mengatakan bahwa teknik akuntansi di lain pihak merupakan aturan khusus yang berasal dari prinsip akuntansi untuk mengakui transaksi khusus dan kejadian khusus yang dihadapi oleh kesatuan akuntansi. Selanjutnya dia juga menggambarkan Hirarki Elemen Struktur Akuntansi Teori Akuntansi berikut ini.

**Gambar 2**  
**Hirarki Elemen Struktur Teori Akuntansi**



Pemilihan kebijakan akuntansi sebagaimana disebutkan di atas adalah sangat penting dan pemilihan itu haruslah didasarkan pertimbangan-pertimbangan realitis. Pemilihan kebijakan akuntansi ini juga dapat memberikan konsekuensi

yang sangat berarti terhadap kredibilitas data dan informasi keuangan suatu perusahaan. Sebagaimana yang dikatakan Scott (1997:343-344) berikut ini:

“Accounting policy choice also has signaling properties. For example, a firm may adopt a number of conservative accounting policies. A high-type firm can do this and still report profit, while a low-type firm would report losses. Thus, conservative accounting policies can signal manager’s view of the firm’s future. The signaling properties of accounting policy choice are related to the use of earnings management to credibly reveal inside information”.

Manajemen, sebagai pihak yang diberikan hak dan tanggungjawab untuk mengelola suatu perusahaan untuk mencapai tujuan laba, mempunyai kepentingan untuk memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingannya sepanjang informasi yang dihasilkan atas kebijakan akuntansi yang dipilih tersebut tidak menjadi salah saji secara material sehingga pihak lain tidak mengalami kehilangan kepentingan atas informasi keuangan bersangkutan. Kebijakan akuntansi yang dipilih haruslah diungkapkan supaya laporan keuangan tersebut jelas, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1994: PSAK No 1; 09) berikut ini:

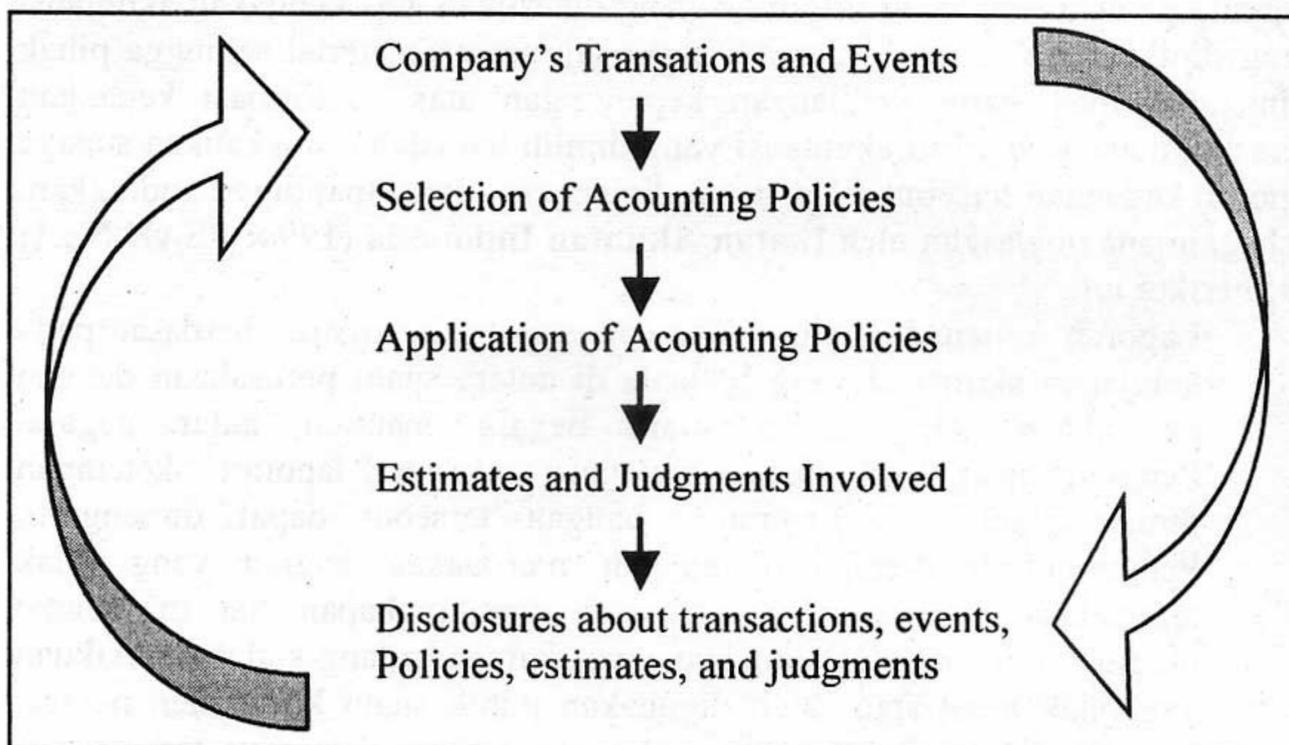
Laporan keuangan harus jelas dan dapat dimengerti, berdasar pada kebijakan akuntansi yang berbeda di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam suatu negara maupun antar negara. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal ini sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

### **Kualitas Laporan Keuangan dan Keputusan Ekonomi**

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu perusahaan tertentu. Kualitas laporan keuangan sebagaimana kualitas output lainnya sangat tergantung kepada proses pembuatannya dan manfaat bagi para pemakainya. Artinya semakin bagus proses pembuatan yang dilaksanakan maka semakin bagus pulalah kualitas laporan keuangan bersangkutan dan sebaliknya. Selanjutnya semakin bermanfaat laporan keuangan bersangkutan bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi maka semakin berkualitaslah laporan keuangan bersangkutan dan sebaliknya.

Proses laporan keuangan secara berturut-turut dimulai dari transaksi-transaksi, pemilihan kebijakan akuntansi, penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih, estimasi dan pertimbangan, dan pengungkapan transaksi, kebijakan, taksiran dan pertimbangan. **Jonas and Blanchet (2000:355)** menggambarkan proses laporan keuangan sebagaimana terlihat dalam Gambar 3. Jika dilihat dari Gambar 1 dan 3 maka jelaslah bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan adalah sangat penting. Kebijakan akuntansi secara lebih dominan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dan pemilihan kebijakan akuntansi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

**Gambar 3**  
**The Financial-Reporting Process**



Sumber: Gregory J. Jones and Jeannot Blanchet, 2000., *Assessing Quality of Financial Reporting; Accounting Horizons*, Vol 14. No 3.

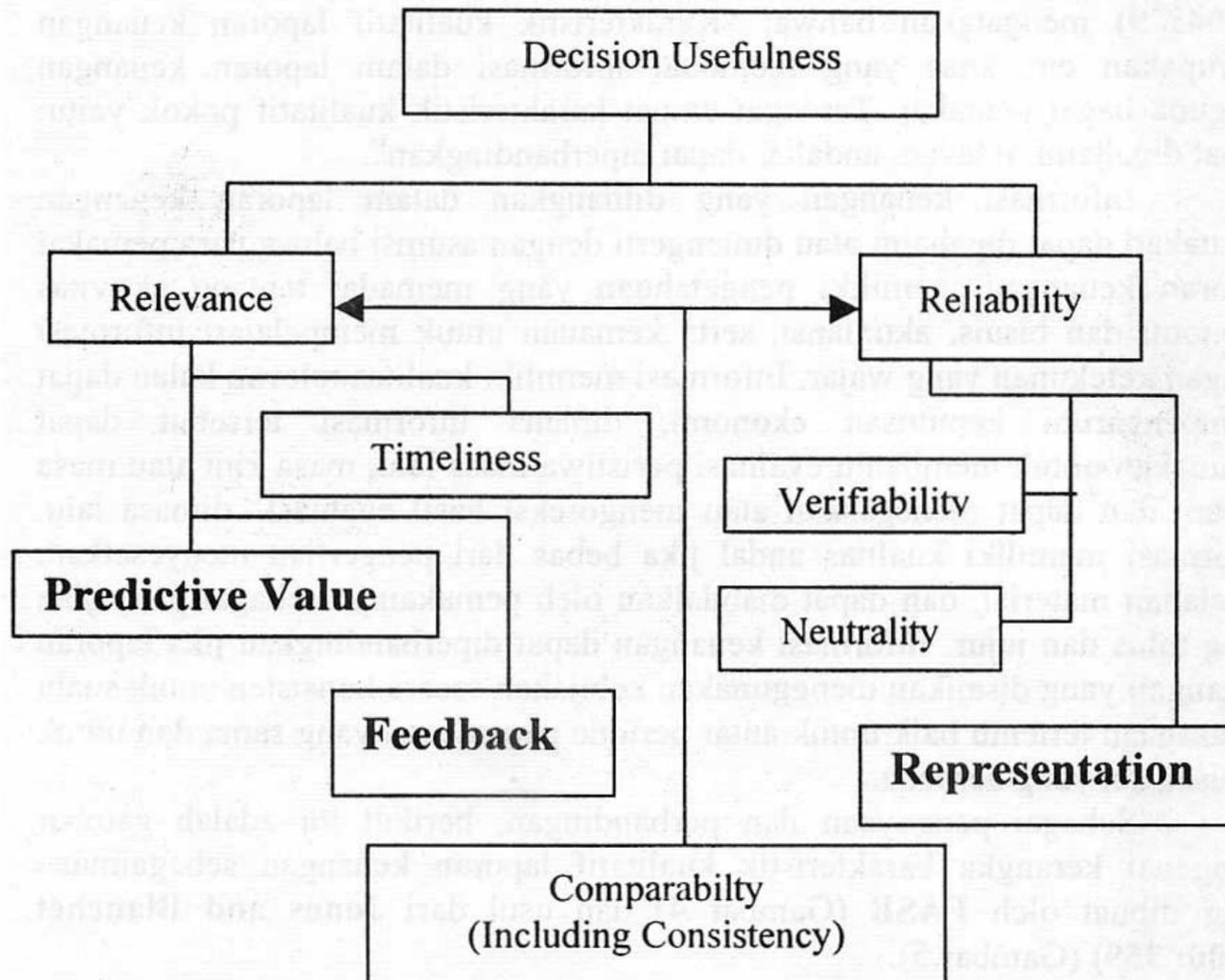
Standar akuntansi keuangan berisikan banyak kebijakan akuntansi yang sudah standar atau baku. Tersedianya kebijakan akuntansi yang bervariasi akan memberikan pilihan atau alternatif kepada manajemen sehingga data akuntansi yang disajikan akan menjadi lebih berkualitas. Di lain pihak tersedianya kebijakan akuntansi yang banyak dapat menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan dimana adanya peluang untuk mempercantiknya (*window dressing*). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan **Wolk, Francis, and Tearney (1992: 82)** "The reason for failures of financial reporting and auditing are too much management flexibility in the choice of accounting policies, and occasional laxity by auditors".

Kualitas laporan keuangan dilihat sebagai suatu produk adalah tergantung kepada sejauh mana laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi. **Ikatan Akuntan Indonesia (1994: 9)** mengatakan bahwa; “Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, andal & dapat diperbandingkan”.

Informasi keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan dikatakan dapat dipahami atau dimengerti dengan asumsi bahwa para pemakai laporan keuangan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi, dimana informasi tersebut dapat digunakan untuk membantu evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, dan dapat menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Informasi keuangan dapat diperbandingkan jika laporan keuangan yang disajikan menggunakan kebijakan secara konsisten untuk suatu perusahaan tertentu baik untuk antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Sebagai pengayaan dan perbandingan, berikut ini adalah gambar mengenai kerangka karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang dibuat oleh **FASB (Gambar 4)** dan usul dari **Jonas and Blanchet (2000: 359) (Gambar 5)**.

**Gambar 4**  
**FASB's Qualitative Characteristics of Financial Information**



Berdasarkan Gambar 4 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa informasi keuangan dapat berguna secara optimal dalam rangka pengambilan keputusan jika informasi keuangan tersebut relevan dan andal. Relevansi informasi keuangan tergantung kepada apakah informasi keuangan tersebut memenuhi prinsip tepat waktu (*timeliness*), dapat digunakan sebagai alat memprediksi ke depan (*predictive value*), dan mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*). Keandalan informasi keuangan tergantung kepada apakah informasi keuangan tersebut dapat memverifikasi (*verifiability*), disajikan secara jujur dan tulus (*representational faithfulness*), dan juga secara netral tanpa berpihak kepada kepentingan pihak tertentu (*neutrality*). Relevansi dan keandalan informasi keuangan secara bersama-sama juga tergantung kepada apakah informasi keuangan tersebut dapat diperbandingkan dan konsisten (*comparability, including consistency*).

Jonas and Blanchet (2000: 359), sebagaimana terlihat pada Gambar 5, menambahkan bahwa informasi keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan selain relevan dan andal sebaiknya juga memiliki kejelasan (*clarity*)



pemeriksaan dan pendapat pemeriksa independen (*independent auditor*) atas laporan keuangan tidaklah secara otomatis dapat disimpulkan bahwa informasi keuangan tersebut memenuhi kualitas yang diharapkan. Salah satu alasan kenapa laporan keuangan tersebut kemungkinan belum mencapai kualitas yang diharapkan adalah karena manajemen dan pemeriksa independen tersebut mempunyai kebebasan untuk memilih kebijakan akuntansi yang akan digunakan sesuai dengan pertimbangannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan **Wolk, Francis, and Tearney (1992:82)** berikut ini; "*the reason for failures of financial reporting and auditing are too much management flexibility in the choice of accounting policies, and occasional laxity by auditor*". Pemilihan kebijakan akuntansi diduga akan semakin luas pada saat keadaan ekonomi kurang normal seperti pada saat terjadinya fluktuasi kurs Rupiah. Hal ini dilakukan pada dasarnya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih realistis dengan keadaan ekonomi dan bisnis yang sebenarnya.

## **BEBERAPA APLIKASI & PEMBAHASAN**

### **A. Kegiatan Usaha Luar Negeri (*Foreign Operation*)**

**Ikatan Akuntan Indonesia (1994:PSAK No 10; 05)** mengatakan bahwa; "Kegiatan usaha luar negeri (*foreign operation*) adalah suatu anak perusahaan (*subsidiary*), perusahaan asosiasi (*associates*), usaha patungan (*joint venture*) atau cabang perusahaan pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara di luar negara perusahaan pelapor. Kegiatan usaha tersebut dapat merupakan suatu bagian integral dari suatu perusahaan pelapor atau suatu entitas asing". Untuk memfokuskan pembahasan, kegiatan usaha luar negeri yang dimaksud adalah kegiatan usaha luar negeri yang merupakan suatu bagian integral dari perusahaan pelapor.

Suatu kegiatan usaha luar negeri yang merupakan suatu bagian integral dari perusahaan pelapor diharuskan membuat laporan keuangan dalam mata uang negara dimana induk perusahaan tersebut berlokasi. Jika nilai mata uang negara dimana induk perusahaan berfluktuasi secara signifikan dengan mata uang negara luar dimana kegiatan usaha luar negeri dilakukan, maka laporan keuangan yang disajikan secara konvensional cenderung kurang informatif yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat relevansi dan keandalannya. Hal ini terlihat sesuai dengan **PSAK No 10** berikut ini:

#### *Pengakuan awal:*

- a. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
- b. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, contohnya, suatu kurs rata-rata selama

seminggu atau sebulan mungkin digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap mata uang asing yang terjadi selama periode itu.

*Pelaporan pada tanggal neraca berikutnya pada setiap tanggal neraca;*

- a. Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif.
- b. Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi.
- c. Pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan.

Dari kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK tersebut di atas, jelaslah bahwa pada saat kurs rupiah yang berfluktuasi secara signifikan sebagaimana terjadi misalnya pada tahun 1998 laporan keuangan akan menjadi tidak dapat digunakan secara optimal dalam rangka pengambilan keputusan. Sebagai contoh, misalkan, suatu kegiatan usaha luar negeri menjual barang dagangan secara kredit di Amerika Serikat pada 31 Maret 1998 sebanyak US \$ 10.000 yang akan ditagih pada bulan Nopember 1998. Selanjutnya, jika diketahui bahwa perusahaan ini membuat laporan keuangan pada Juni 1998, maka khusus transaksi ini sesuai dengan kurs tengah rupiah sesuai dengan tabel 1 di atas akan terlihat sebagai berikut:

- a. Pada saat penjualan (31 Maret 1998), perusahaan akan mencatat penjualan dan piutang sebesar Rp 83.250.000 (US \$ 10.000 x Rp 8.325).
- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan (30 Juni 1998), perusahaan akan mencatat piutang sebesar Rp 149.000.000 (US \$ 10.000 x Rp 14.900).
- c. Pada saat penagihan piutang (30 Nopember 1998), perusahaan akan mencatat penerimaan kas piutang usaha sebesar Rp 73.000.000 (US \$ 10.000 x Rp 7.300).

Ketiga catatan tersebut di atas mempunyai konsekuensi yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan dimana pada saat tanggal neraca 30 Juni 1998, penjualan dilaporkan Rp 83.250.000, piutang usaha dilaporkan Rp 149.000.000 yang pada awalnya dicatat Rp 83.250.000. Pada saat penagihan piutang yang sudah dilaporkan sebesar Rp 149.000.000 diterima secara kas hanya sebesar Rp 73.000.000. Perbedaan-perbedaan ini mensyaratkan bahwa seolah-olah keadaan perusahaan 30 Juni 1998 adalah lebih bagus dari pada keadaan 31 Maret 1998. Hal ini terjadi karena perbedaan piutang usaha sebesar Rp 65.750.000 (Rp 149.000.000 – Rp 83.250.000) dapat dibebankan pada rugi-laba perusahaan dalam hal ini rugi laba yang belum direalisasi. Kemudian pada tanggal 30 Nopember pada waktu penyelesaian piutang akan dicatat kerugian akibat selisih kurs Rp 10.250.000 (Rp 83.250.000 – Rp 73.000.000). Keadaan ini berakibat seolah-olah keadaan

perusahaan 30 Nopember 1998 adalah lebih buruk dari pada keadaan 31 Maret 1998.

Sehubungan dengan keadaan berfluktuasinya kurs rupiah tersebut, sebagaimana dengan contoh di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan akuntansi yang tersedia tidak serta merta menjadi suatu jalan keluar untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini terlihat dari perangkat kebijakan akuntansi yang tersedia untuk pengakuan selisih kurs (PSAK No 10; 13) berikut ini:

Kecuali untuk hal:

- a. Selisih kurs yang timbul pada suatu pos moneter yang dalam substansinya membentuk bagian investasi neto perusahaan dalam suatu entitas asing harus diklasifikasikan sebagai ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan hingga saat pelepasan (*disposal*) investasi neto dan pada saat tersebut harus diakui sebagai pendapatan atau beban.
- b. Suatu perusahaan mungkin memiliki suatu pos moneter berupa hutang piutang dengan suatu entitas asing. Apabila timbulnya dan penyelesaian pos moneter tersebut tidak terencana, dalam substansinya merupakan suatu perluasan. Atau pengurangan dari, investasi neto perusahaan dalam entitas asing tersebut. Pos moneter itu mungkin mencakup piutang jangka panjang atau pinjaman tetapi tidak mencakup piutang dagang atau hutang dagang.

Maka, selisih penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan.

#### **B. Perusahaan Orientasi Ekspor**

Pada awal terjadinya krisis ekonomi yang ditandai dengan melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, khususnya terhadap dollar Amerika Serikat, tersirat suatu kegembiraan pada para eksportir. Kegembiraan ini timbul karena dengan melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat maka transaksi ekspor, yang umumnya dalam dollar Amerika Serikat, menghasilkan rupiah yang lebih besar dari pada ekspor-ekspor sebelumnya. Hasil rupiah yang lebih besar ini juga tertuang dalam laporan informasi keuangan perusahaan. Informasi keuangan perusahaan yang demikian menunjukkan bahwa keadaan perusahaan lebih baik dari pada keadaan sebelum krisis terjadi walaupun sebenarnya mungkin kuantitas unit atau volume ekspor adalah sama dengan ekspor sebelumnya tapi laba yang dilaporkan adalah lebih besar. Semakin lemah nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat maka semakin besarlah laba yang dilaporkan oleh perusahaan dan sebaliknya.

Sesuai dengan PSAK No 10; 06 mengatakan bahwa :

Suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk yang timbul ketika suatu perusahaan;

- a. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing.
- b. Meminjam (hutang) atau meminjamkan (piutang) dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing.
- c. Menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana.
- d. Memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban, yang didenominasi dalam suatu mata uang asing.

Dari penjelasan PSAK No 10; 06 tersebut di atas jelaslah bahwa transaksi ekspor termasuk di dalamnya. Selanjutnya PSAK No 10; 07 mengatakan bahwa; transaksi dalam mata asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Dengan demikian jelaslah bahwa kebijakan akuntansi untukantisipasi fluktuasi nilai rupiah sebagaimana disebutkan di atas belumlah memadai dan cukup. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa kualitas laporan keuangan tidak dapat digunakan secara optimal dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh para pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk menghasilkan informasi keuangan dari berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi, kebijakan akuntansi yang sering dianjurkan dan digunakan adalah dengan melakukan penyesuaian (*adjustment entries*) dan penerapan prinsip pengungkapan sepenuhnya (*full disclosure principle*). Penyesuaian dan prinsip pengungkapan seperti ini sebenarnya tidak menyentuh substansi persoalan yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai rupiah tersebut, karena selisih kurs yang terjadi antara tanggal transaksi dengan tanggal pelaporan akan dicatat sebagai laba atau rugi selisih kurs. Disebutkan sebagai tidak menyentuh persoalan dapat terjadi, misalnya, suatu perusahaan selalu membuat laporan keuangan bulanan atas ekspor atau penjualan dalam mata uang asing. Dengan asumsi bahwa kuantitas penjualannya adalah sama setiap bulannya, tapi nominal rupiah yang dihasilkannya berbeda sesuai dengan perbedaan nilai kurs rupiah pada tanggal pelaporan atau transaksi bersangkutan. Jika nilai rupiah rendah pada waktu terjadinya pelaporan atau transaksi maka laba yang dilaporkan adalah tinggi, sebaliknya jika nilai rupiah kuat atau tinggi pada waktu terjadinya pelaporan atau transaksi maka laba yang dilaporkan akan menjadi lebih kecil.

### **C. Industri atau Perusahaan yang menggunakan Bahan Baku Impor Secara Signifikan.**

Industri atau perusahaan yang menggunakan bahan baku impor secara signifikan adalah perusahaan industri yang menghasilkan barang jadi yang bahan bakunya sebagian besar dengan membelinya dari luar negeri. Contoh perusahaan yang bahan bakunya sebagian besar impor adalah perusahaan industri plastik. Industri plastik ini secara umum menggunakan bahan baku impor yang cukup besar dalam proses produksinya tetapi hasil produksinya

sebagian besar dijual di dalam negeri (**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat; 2001**). Keadaan ini menunjukkan bahwa biaya produksinya akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Di lain pihak pendapatan atau penjualannya adalah relatif stabil tanpa dipengaruhi oleh kurs rupiah yang berfluktuasi tersebut.

Secara umum terdapat tiga perkiraan yang sangat penting yang harus diberikan perhatian secara khusus sehubungan dengan laporan keuangan. Ketiga perkiraan tersebut adalah; persediaan, biaya produksi, dan hutang.

#### 1. *Persediaan*

Persediaan dikelompokkan ke dalam pos aktiva non-moneter (*nonmonetary assets*). **Kieso and Weygandt (1989:1293)** mengatakan bahwa: "*Nonmonetary assets are the items whose prices in terms of the monetary unit may change over time: for example, inventories, investment in common stocks, proverty, plant, and equipment, and deferred charges that represent costs expended in the past*". Kebijakan akuntansi untuk mencatat pos non-moneter sehubungan dengan transaksi dalam valuta asing termasuk persediaan tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi harus tetap dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi; dan pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan (**PSAK No 10; 09 b dan c**).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa nilai persediaan yang akan disajikan dalam neraca pada saat terjadinya fluktuasi kurs rupiah menjadi tidak relevan karena nilai yang terkandung di dalamnya menjadi kurang tepat waktu (*timeliness*). Demikian juga jika persediaan tersebut dinilai kembali pada saat tanggal pelaporan (neraca), yaitu dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan, tidak serta merta akan menjamin bahwa nilai persediaan yang disajikan tersebut menjadi relevan. Ke-tidak-relevan-an nilai persediaan yang disajikan tersebut terjadi karena dengan terjadinya fluktuasi kurs rupiah akan mengakibatkan nilai prediksi (*predictive value*) dan nilai umpan balik (*feedback value*) informasi tersebut cenderung menurun. Penilaian kembali atas nilai persediaan tersebut juga masih menyisakan persoalan, yaitu akan melanggar prinsip dapat diperbandingkan (*comparability*) dan prinsip taat azas (*consistency*).

Di dalam prinsip akuntansi yang diterima secara umum terdapat beberapa metode penilaian persediaan seperti; *retail method, FIFO, LIFO, weighted average cost method, cost or market whichever is lower*, dan *replacement cost*, dan lain-lain. Dalam prakteknya metode-metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan bersangkutan. Pada saat fluktuasi kurs rupiah terjadi metode yang lebih realistis adalah; *cost or market whichever is lower*, dan *repla cement cost* yang dimodifikasi terhadap fluktuasi kurs rupiah bersangkutan. Modifikasi ini akan menghasilkan nilai persediaan sesuai dengan nilai kurs dan harga

pada tanggal penilaian atau pelaporan dibuat. Selisih penilaian atau kurs kemudian dilaporkan sebagai laba-rugi selisih kurs atau penilaian yang belum direalisasi. Nilai persediaan yang sesuai dengan kurs pada tanggal pelaporan masih tetap kurang mempunyai arti penting dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam keadaan fluktuasi kurs rupiah yang tidak menentu.

2. *Biaya Produksi*

Perusahaan atau industri yang bahan bakunya banyak tergantung kepada bahan baku impor akan menghadapi kesulitan yang relatif banyak jika dibandingkan dengan industri yang sepenuhnya telah menggunakan bahan baku lokal. Kesulitan tersebut adalah dalam penentuan biaya produksi barang yang dihasilkan. Kesulitan dalam penentuan harga pokok produksi selanjutnya akan memunculkan kesulitan juga di dalam penentuan harga jual (*pricing*). Secara normal pembelian atau pengadaan persediaan, produksi, dan sampai penjualan kembali barang yang diproduksi memerlukan waktu tertentu. Dalam siklus waktu bersangkutan kurs rupiah telah berfluktuasi sedemikian rupiah.

Dengan kurs yang berfluktuasi dalam siklus waktu yang dimaksud akan memunculkan persoalan dalam penentuan harga pokok produksi. Apakah harga pokok produksi yang diakumulasikan dari bahan baku tersebut ditetapkan berdasarkan kurs pada saat pembelian, kurs pada saat bahan baku dimasukkan ke dalam proses produksi, kurs pada saat barang selesai diproduksi, atau kurs pada saat barang tersebut dijual kembali. Sesuai dengan prinsip sesuai atau sebanding (*matching principle*) maka harga pokok produksi haruslah ditetapkan berdasarkan kurs pada saat barang tersebut dijual atau kurs pada saat pendapatan atas barang tersebut dapat ditentukan. Dengan ditetapkannya harga pokok produksi berdasarkan kurs pada saat penjualan maka akan terdapat perbedaan atau selisih kurs berdasarkan pada saat perolehan dengan kurs pada saat penjualan dimaksud. Sesuai dengan penerapan prinsip sebanding, selisih kurs tersebut langsung dialokasikan ke dalam biaya produksi. Jika kurs rupiah pada saat penjualan lebih rendah dari pada kurs pada saat pembelian maka harga pokok produksi barang akan semakin tinggi dan sebaliknya.

3. *Hutang Usaha*

Hutang usaha sebagian besar timbul dari pembelian kredit, termasuk di dalamnya pembelian bahan baku dari luar negeri. Hutang usaha termasuk pos kewajiban moneter. Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca (PSAK No 10; 09 a). Hutang usaha timbul dan dicatat pada saat terjadinya pembelian, untuk itu kurs yang digunakan adalah kurs pada saat terjadinya transaksi. Secara umum tanggal timbulnya hutang usaha, pelaporan, dan pembayarannya mempunyai tanggal yang berbeda satu sama lain dan dalam siklus waktu tertentu. Dalam siklus waktu yang

demikian dapat dipastikan bahwa kurs rupiah pada ketiga tanggal tersebut adalah berbeda. Jika kurs rupiah pada tanggal neraca berbeda dengan kurs pada tanggal transaksi, maka terdapat selisih kurs. Selisih kurs ini akan dibebankan ke dalam laporan rugi laba. Kurs rupiah yang lebih rendah pada tanggal neraca dibandingkan dengan tanggal terjadinya hutang tersebut, diakui sebagai suatu rugi selisih kurs dan sebaliknya diakui sebagai laba selisih kurs. Kebijakan akuntansi seperti ini pada dasarnya tidak menyentuh substansi persoalan yang dialami oleh perusahaan karena nyatanya perusahaan tidak mengalami kerugian atau laba ekonomi. Karena tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya maka informasi yang dihasilkannya juga tidak dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan ekonomi.

## **SIMPULAN**

Krisis ekonomi yang ditandai dengan ketidakstabilan nilai tukar rupiah yang berkepanjangan mempengaruhi seluruh aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan hukum. Salah satu aspek ekonomi yang sangat terpengaruh adalah informasi keuangan. Informasi keuangan yang dihasilkan sistem informasi akuntansi perusahaan menjadi kurang relevan dan andal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurunnya kualitas informasi keuangan ini tidak terlepas dari kebijakan akuntansi yang tersedia tidak mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai suatu prinsip atau teknik dalam mengakomodasikan fluktuasi rupiah bersangkutan.

Banyak kebijakan akuntansi yang tersedia untuk digunakan dalam menjawab ketidakstabilan nilai tukar rupiah tersebut. Sehingga perusahaan atau manajemen mempunyai kesempatan yang luas untuk memilih kebijakan akuntansi yang cocok dan relevan. Ketidakstabilan kurs rupiah ini mendorong pemilihan kebijakan akuntansi yang ada. Dari seluruh kebijakan akuntansi yang tersedia ternyata tidak dapat mempertahankan kualitas informasi keuangan seperti sedia kala, kebijakan akuntansi yang ada tersebut hanya mampu untuk meminimumkan ke-tidak-relevan-an dan ke-tidak-andal-an informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang tidak optimal akan menghasilkan keputusan ekonomi yang tidak optimal pula.

Melihat kenyataan ini maka perlu dipikirkan untuk melakukan terobosan-terobosan baru di dalam menetapkan kebijakan akuntansi, khusus mengenai perusahaan yang mempunyai transaksi uang asing, yang lebih lengkap dari pada yang sudah diatur dalam prinsip akuntansi yang ada. Membuat frekuensi laporan keuangan yang sesering mungkin baik dalam bentuk laporan harian, mingguan, maupun dalam bentuk laporan bulanan. Membuat suplemen-suplemen dan penjelasan-penjelasan laporan keuangan seperti; prediksi kurs rupiah, statistik kurs rupiah secara mingguan atau bulanan sejelas dan sepadat

mungkin, tanpa mengurangi prinsip *clarity, completeness, dan verifiability*. Hal lain yang penting bagi para pengambil keputusan ekonomi adalah memperoleh informasi non-keuangan sebanyak-banyaknya sehingga keputusan ekonomi yang diambil tidak salah arah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia., 2001., *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (Indonesian Financial Statistics)*., Jakarta; Bank Indonesia.
- Belkaoui, Ahmed., 1986., *Accounting Theory*, Editor; Erwan Dukat, Yogyakarta.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat., 2002., *Program Pembangunan Perdagangan Luar Negeri Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Menghadapi Perdagangan Bebas Di Propinsi Jawa Barat; Disampaikan pada Forum Rapat Koordinasi Disperindag Jawa Barat dengan Dinas Daerah yang Membidangi Kegiatan Indag.*
- Hendriksen, Eldon S., 1982, *Accounting Theory*, 4<sup>th</sup> Edition, Terj. Nugroho Widjanto, 1991, *Teori Akuntansi*, Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia., 1994., *Standard Akuntansi Keuangan; PSAK No 1; 07, 08, dan 09.*, Jakarta; Salemba Empat.
- ., 1994., *Standard Akuntansi Keuangan; Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.*, hal.9., Jakarta; Salemba Empat.
- ., 1994., *Standard Akuntansi Keuangan; PSAK No 10; 05, 06, 07, 08, 09, dan 13.*, Jakarta; Salemba Empat.
- Jones, Gregory J., Jeannot Blanchet., 2000., *Assessing Quality of Financial Reporting; Accounting Horizons*, Vol 14. No 3.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, 1989, *Intermediate Accounting*, Sixth Edition, New York; John Wiley & Sons.
- Wolk, Harry I., Jere R. Francis., Michael G. Tearney., 1992., *Accounting Theory; A Conceptual and Institutional Approach*, Third Edition, Cincinnati-Ohio; South-Western Publishing Co.